

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba studi empiris pada perusahaan industri barang konsumsi membutuhkan kajian teori antara lain:

#### **2.1 Pasar Modal**

Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan, khususnya negara Indonesia. Dalam perekonomian suatu negara, sumber dana yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan sangatlah terbatas. Oleh karena itu, perlu dicarikan adanya sebuah solusi pembiayaan jangka panjang. Dengan dukungan dana jangka panjang ini, maka roda pembangunan khususnya dibidang swasta dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pasar modal mempunyai peranan yang besar bagi perekonomian negara Indonesia. Hal ini dikarenakan, pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi dalam pasar modal untuk menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dengan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Adanya pasar modal, investor dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*), sedangkan *issuer* atau suatu perusahaan dapat memanfaatkan dana

investasinya untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasional perusahaan.

Oleh karena itu, manajemen perusahaan dituntut mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi karena adanya sorotan positif dari masyarakat luas. Dengan pengelolaan yang professional, maka kualitas perusahaan akan meningkat, jika makin banyak perusahaan yang *go public*, berarti makin tinggi kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan, baik produk maupun jasa. Hasil dari perekonomian yang efisien akan kembali kepada masyarakat luas untuk dapat dinikmati.

## **2.2 Corporate Governance**

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

*Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris atau dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap

memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Santosa, 2008).

Sedangkan unsur-unsurnya secara umum adalah:

- a. *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparency* (tranparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
- c. *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

### **2.3 Kepemilikan Manajerial**

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi

manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Budiono, 2005). Dalam beberapa situasi, kepemilikan terkonsentrasi tidak mungkin optimal karena pihak bukan pemegang saham seperti manajer, karyawan dan konsumen memiliki dana sedikit untuk membuat hubungan khusus dalam investasi (Shleifer dan Vishny, 1986). *“In some situations, concentrated ownership may not be optimal because nonshareholder constituencies such as managers, employees and consumer are left with too few rents and too little incentive to make relationship-specific investments (Shleifer dan Vishny, 1986)”*.

#### **2.4 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari

informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

## **2.5 Ukuran Dewan Komisaris**

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Agar dewan komisaris dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif dan independen. Selain itu, tanggung jawab lain yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan hidup. Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan juga diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan

(stakeholder) lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan (BAPEPAM, 2006).

## **2.6 Ukuran Dewan Direksi**

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal bagaimana mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling, 1976). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

## **2.7 Komisaris Independen**

Siallagan dan Machfoedz (2006) menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accruals* dan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q, menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara negatif

terhadap kualitas laba, sedangkan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Kriteria tentang Komisaris Independen menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.

5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

## **2.8 Manajemen Laba**

Scott (dalam Halim dkk, 2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut “*Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm*”. Dari definisi tersebut manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan.

Ada beberapa bentuk manajemen laba diantaranya adalah *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization* dan *income smoothing*. *Taking a bath* digunakan selama periode *organization stress* atau reorganisasi. Jika manajer harus melaporkan kerugian, maka ia akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Dengan tindakan ini manajer berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapat dilimpahkan ke manajer lama, jika terjadi pergantian manajer. *Income minimization* dipilih selama periode dengan profitabilitas tinggi. Sehingga jika periode yang akan datang diperkirakan laba turun drastis, dapat diatasi dengan pengambilan jatah sebelumnya. *Income maximization* dilakukan manajer terutama untuk tujuan syarat perjanjian utang juga untuk melakukan *income maximization*. *Income smoothing* dilakukan dengan meratakan laba investor, karena umumnya investor adalah *risk averse* dan menyukai laba yang relatif stabil menurut Scott, dalam (Kusuma dan Sari, 2003).

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* (PAT) dan *Agency Theory*. Tiga hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman (dalam Halim dkk, 2005) adalah :

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan

laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di atas *cap*, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba berada di atas *cap*. Jadi hanya jika laba bersih berada di antara *bogey* dan *cap*, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.

b. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

c. *The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)*

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul

dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

Para manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi. Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola laba. Perilaku manajemen yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* manajer dan *efficient contracting*. Sebagai perilaku *opportunistic*, manajer memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi dan hutang dan *political cost*. Perilaku oportunis ini direfleksikan dengan melakukan rekayasa keuangan dengan menerapkan *income increasing* atau *income decreasing discretionary accrual*. Sedangkan sebagai *efficient contracting* yaitu meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat. Perilaku manajemen oportunis dikenal dengan istilah *earnings management* (manajemen laba) (Herawati, 2008). Model yang digunakan untuk menghitung DA adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

$DA_{it}$  = *Discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

$TA_{it}$  = *Total accruals* perusahaan i pada periode t

$NDA_{it}$  = *Non discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

$$TA_{it} = \frac{(\Delta CA_t - \Delta CL_t - \Delta Cash_t + \Delta STD - Deprt_t)}{A_{t-1}}$$

$\Delta CA_t$  = *Delta Current Assets* (aktiva lancar) pada tahun t

$\Delta CL_t$  = *Delta Current Liabilities* (utang lancar) pada tahun t

- $\Delta\text{Cash}_t = \text{Delta Cash and Cash Equivalents Assets}$  (kas dan setara kas) pada tahun t
- $\Delta\text{STD} = \text{Delta Debt Included in Current Liabilities}$  (hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun) pada tahun t
- $\text{Deprt}_t = \text{Depreciation and Amortization Expense}$  (biaya depresiasi dan amortisasi) pada tahun t
- $A_{t-1} = \text{Total Assets}$  (total aktiva) 1 tahun sebelum periode t

Untuk mencari NDA dengan rumus:

$$\text{NDA}_t = \text{Mean/rata-rata (TA}_{t\text{IND}})$$

$\text{NDA}_t = \text{non discretionary accruals}$  pada periode t

$\text{TA}_{t\text{IND}} = \text{total accruals}$  industri pada periode t

Koefisien manajemen laba positif menunjukkan jika laba masa kini meningkat maka manajer akan melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba (*positive discretionary accruals*). Hal ini dapat dijelaskan melalui *bonus plan hypothesis* dimana manajer berusaha mendapatkan bonus tambahan dengan menaikkan laba masa kini dengan asumsi laba masa kini berada diantara *cap* dan *bogey*. Koefisien manajemen laba negatif menunjukkan jika laba masa depan meningkat maka manajer akan melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba masa kini (*negative discretionary accruals*). Hal ini juga dapat dijelaskan melalui *bonus plan hypothesis* dimana manajer berusaha mendapatkan bonus tambahan di masa mendatang sehingga manajer cenderung menggeser laba masa kini ke masa mendatang dengan asumsi laba masa mendatang berada diantara *cap* dan *bogey* (Halim dkk, 2005).

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (pimpinan) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan beberapa pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak ingin memaksimalkan hubungan utilitas, ada alasan kuat untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari pimpinan. *"We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal"*.

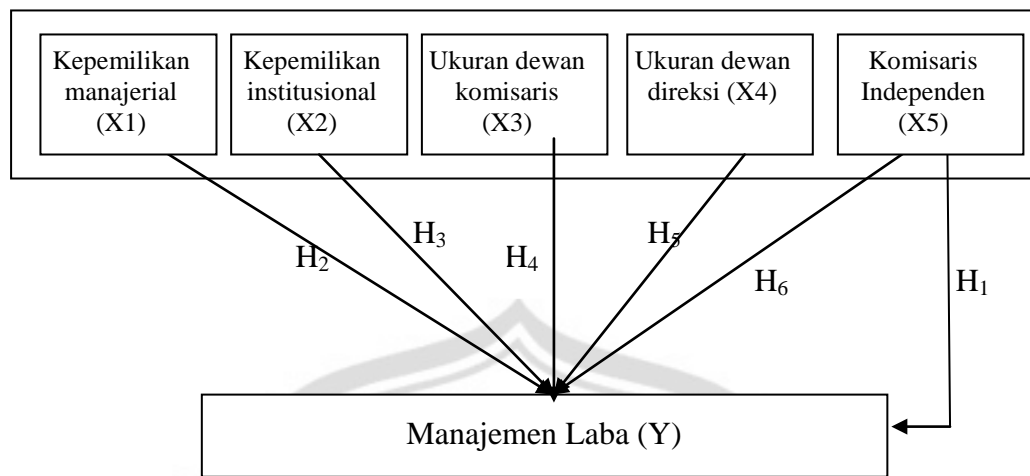
*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance*

diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Budiono, 2005).

Ukuran dewan komisaris yang besar kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainn ya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata -mata demi kepentingan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001). Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikirannya dapat digambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

## 2.10 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis:

- $H_1$  = Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- $H_2$  = Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- $H_3$  = Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- $H_4$  = Ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- $H_5$  = Ukuran dewan direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H<sub>6</sub> = Komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

